



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. MUFLIK TEGUH YULI PITOYO

Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

3. NHK : **657387**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.	718.950.000
---------------------------	-------------

 Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/50 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 718.950.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN P4.500.000

 MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500,000

 MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA / JLX Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	M	Maria	Rp.	75.000.000
D. SURAT BERHARGA			Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	KPIK	KPK	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA			Rp.	
Sub Total	WALL .	WOK-	Rp.	889.450 <mark>.000</mark>
HUTANG			Rp.	408.817.731
. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	al .	al.	Rp.	480.632.269

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

